

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi dalam perbaikan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dianggap sangat penting. Proses inovasi melibatkan pengembangan dan pemanfaatan produk atau barang yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks manajemen pelayanan publik di Indonesia, diskusi seputar inovasi dalam pelayanan publik menjadi krusial, terutama mengingat persaingan global yang ketat dan disparitas dalam pengetahuan dan teknologi. Pelayanan publik, yang merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui tindakan orang lain secara tidak langsung, kini memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi pemerintah. Inovasi diartikan sebagai perubahan baru, mencakup ide, gagasan, praktik, atau objek yang diatur melalui program yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara efektif dan efisien, peningkatan kualitas hasil menunjukkan keberhasilan inovasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencantumkan perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi dukungan besar bagi pemerintah daerah khususnya untuk melakukan inovasi (Yanuar, 2019, p. 2).

Inovasi dianggap sebagai aset berharga bagi organisasi pemerintah, dan pemimpin di sektor publik maupun swasta memandang inovasi sebagai kunci untuk mengubah tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas organisasi. Keberadaan inovasi menjadi dukungan yang substansial bagi pemerintah daerah, memberikan insentif dan motivasi untuk melakukan perubahan dan menciptakan solusi kreatif guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah salah satu kebijakan yang mendorong daerah untuk terus berinovasi.

Inovasi dianggap sebagai instrumen penting untuk menanggapi tuntutan zaman dan memajukan kemajuan organisasi, memperlihatkan peran utamanya dalam merangsang perkembangan dan peningkatan efisiensi di sektor publik. Oleh karena itu, pemimpin organisasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, melihat inovasi sebagai keharusan untuk mencapai perubahan positif dan meraih manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang dilayani (Tim Pusat Inovasi Administrasi Negara, 2022). Khairul Muluk (2008) menegaskan bahwa inovasi memegang peran krusial dalam pengembangan pelayanan publik di sektor publik. Dalam pandangannya, inovasi diartikan sebagai produk baru yang menggantikan cara yang lama, sehingga setiap pelayanan publik seharusnya memuat elemen inovasi. Inovasi, yang sering dibicarakan sebagai dasar keunggulan bersaing, biasanya difokuskan pada dunia bisnis. Namun, ia mengatakan bahwa ide itu sangat penting dan harus diterapkan di sektor publik. Dalam sepuluh tahun terakhir, perdebatan tentang inovasi, terutama yang berkaitan dengan organisasi publik, menjadi lebih

menarik. Khairul Muluk (2008) menekankan bahwa penelitian tentang inovasi berkembang seiring dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan bersaing lembaga publik, yang dianggap sangat penting untuk keberlangsungannya. Agung Kurniawan (2007) menyoroti bahwa keberhasilan inovasi dalam pelayanan publik dapat dicapai melalui pengembangan proses, produk, dan metode layanan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, pelayanan publik diartikan sebagai penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, konsep inovasi dalam sektor publik dianggap sebagai suatu solusi atau terobosan yang mampu mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan organisasi di sektor publik. Hal ini membuka pintu untuk perbaikan yang signifikan dalam pelayanan masyarakat, di mana inovasi diartikan sebagai kunci untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan ketersediaan layanan publik. Dengan pendekatan inovatif ini, diharapkan sektor publik dapat menghasilkan perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat yang dilayani (Mirnasari, 2013).

Pelayanan publik diartikan sebagai upaya memberikan layanan atau melayani keperluan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku. Pemerintah, sebagai entitas pelayan, memegang peran sentral dalam memberikan layanan ini. Prinsip dasarnya adalah bahwa pemerintah tidak hanya bertugas untuk melayani kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk melayani masyarakat secara optimal.

Pelayanan publik ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi yang konsisten, dengan memperhatikan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan mempermudah proses kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi elemen krusial dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adanya hak masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang layak dan berkualitas menjadi landasan penting, menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan yang memenuhi standar kualitas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Haqie *et al.*, 2020).

Dalam menjalankan pelayanan yang optimal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, inovasi di sektor publik menjadi suatu keharusan. Holle menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik harus menjadi fokus utama pemerintah, mengingat bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar hak sosial dasar masyarakat, melainkan juga hak fundamental yang mendasar. Pelayanan publik pada dasarnya dirancang untuk memenuhi keinginan masyarakat atau pelanggan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, formulasi tertentu, seperti inovasi, diperlukan untuk mencapai tingkat kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui berbagai bentuk inovasi yang ada. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang unggul, efektif, dan efisien, sesuai dengan keinginan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik diarahkan untuk memberikan dampak positif, baik dalam hal efektivitas maupun kualitas, sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan nyata dalam proses dan hasil

layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, inovasi menjadi kunci untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik guna memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Pendekatan inovatif dapat melibatkan penggunaan teknologi terkini, restrukturisasi proses kerja, atau bahkan implementasi kebijakan baru yang mendukung efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya selaras dengan tuntutan dan harapan masyarakat, serta mampu menciptakan perubahan positif dalam memberikan layanan yang lebih baik (Eldo & Mutiarin, 2019).

Fokus utama organisasi publik saat ini adalah memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan bernilai tinggi. Keterbukaan informasi yang terkait langsung dengan pelayanan menjadi strategi yang mendorong kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Organisasi publik menempatkan pelayanan sebagai pusat perhatian, dengan harapan bahwa kualitasnya yang prima akan menciptakan dampak positif pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, inovasi di sektor publik dianggap sebagai elemen kunci dalam pengembangan pelayanan publik. Kehadiran inovasi diinterpretasikan sebagai produk yang relatif baru dan memiliki potensi untuk menggantikan cara-cara yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, prinsip dasar pelayanan publik adalah memuat inovasi baru untuk memastikan pelayanan yang terus berkembang dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Konsep ini mencerminkan komitmen organisasi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka

melalui penerapan inovasi sebagai sarana untuk merespons dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat (Muharam, 2019).

Keinginan masyarakat untuk pelayanan publik yang unggul, efektif, dan efisien tanpa cacat dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Meskipun seringkali dianggap sebagai solusi untuk masalah, inovasi seringkali menimbulkan masalah baru dan menimbulkan masalah baru. Inovasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam pelayanan publik seringkali menghadapi masalah, terutama jika program tidak memenuhi persyaratan atau jika masyarakat kurang memahami pelayanan publik yang ada. Permasalahan semakin kompleks ketika berbagai inovasi diluncurkan oleh berbagai daerah namun tidak mencapai optimalitas dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di dalam struktur birokrasi. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya yang holistik dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya diterapkan secara efisien tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Situasi ini menyoroti pentingnya mengatasi tidak hanya aspek teknis implementasi inovasi, tetapi juga memperhatikan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan perubahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya diterapkan secara efisien tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Sementara itu ada kemungkinan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah

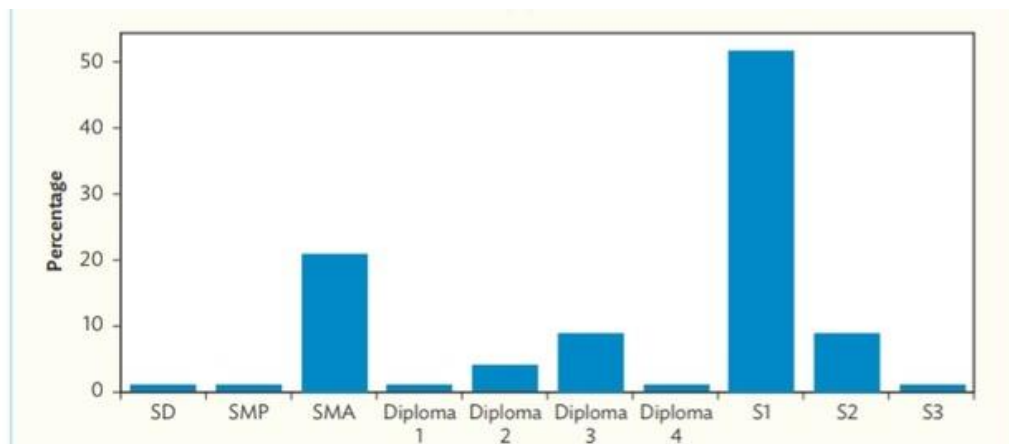
kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa aparat pemerintahan setempat tentang cara melaksanakan dan mengembangkan inovasi. Kurangnya pemahaman tentang inovasi dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem pelayanan publik menjadi hambatan serius. Selain itu, kurangnya kerja sama antar instansi juga diidentifikasi sebagai faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan berbagai program inovasi yang telah direncanakan. Tantangan utama dalam konteks ini adalah menciptakan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi antar instansi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang inovasi, dan memastikan bahwa implementasi inovasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kerjasama di tingkat lokal agar inovasi dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kurangnya pemahaman tentang inovasi dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem pelayanan publik menjadi hambatan serius.

Selain itu, kurangnya kerja sama antar instansi juga diidentifikasi sebagai faktor utama yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan berbagai program inovasi yang telah direncanakan. Tantangan utama dalam konteks ini adalah menciptakan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi antar instansi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang inovasi, dan memastikan bahwa implementasi inovasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan aparat pemerintahan, mempromosikan sinergi antarinstansi, dan meningkatkan literasi

inovasi di kalangan masyarakat guna memastikan efektivitas dan kesuksesan program inovasi dalam pelayanan publik.

Upaya sinergis antar instansi diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pengetahuan aparat pemerintahan, mempromosikan kerja sama lintas-instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Rahman, 2020).

Gambar 1. 1 *Indonesia's Civil Servants Tahun 2018*



Sumber: kumparan.com, 2022.

Menurut laporan "*A Diagnostic Study of The Civil Service in Indonesia*"

kompetensi ASN Indonesia secara keseluruhan masih berada di bawah harapan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Data pencapaian pendidikan ASN Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan, jenjang pendidikan S1 menempati urutan pertama yaitu sebesar 51,97%, diurutan kedua jenjang pendidikan SMA sebesar

20,59%, diurutan ketiga jenjang Diploma III sebesar 9,36%, diurutan keempat jenjang S2 sebesar 9,04%, diurutan kelima jenjang Diploma II sebesar 4,17%, diurutan keenam jenjang Diploma IV sebesar 1,34%, diurutan ketujuh jenjang SMP sebesar 1,29%, diurutan kedelapan jenjang Diploma I sebesar 1,02%, diurutan kesembilan jenjang jenjang SD sebesar 0,71%, dan terakhir diurutan kesepuluh jenjang S3 sebesar 0,51%. Pada intinya Peningkatan jenjang pendidikan sangat penting bagi ASN Indonesia sebagai langkah percepatan menuju pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2024.

Gambar 1.2 Skor Literasi Membaca PISA Indonesia (2000-2022)



Sumber: Website databoks.katadata, 2023.

Skor hasil evaluasi *Program for International Student Assessment (PISA)* 2022 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan hasil sebelumnya pada tahun 2018. Skor membaca menurun sebesar 12 poin menjadi 359, sementara skor matematika turun 13 poin menjadi 366, dan skor sains turun 13 poin menjadi

383. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024. Meskipun dalam RPJMN 2024 ditetapkan target skor yang lebih tinggi, yaitu skor membaca 392, skor matematika 388, dan skor sains 402, namun hasil evaluasi *PISA* 2022 menunjukkan bahwa capaian masih di bawah target yang ditetapkan. Dalam rancangan teknokratik untuk target *PISA* Indonesia pada RPJMN 2025-2029, skor yang ditetapkan adalah skor membaca sebesar 409 dan skor matematika sebesar 419, menunjukkan upaya yang lebih ambisius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan prestasi pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN. Kondisi dinamis dan ironis seperti ini tentu saja menjadi dilema yang berdampak besar terhadap kualitas pendidikan di setiap wilayah di Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam konteks seperti ini, tantangan-tantangan unik seperti akses terbatas terhadap sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang berkualitas dapat mempengaruhi proses belajar-mengajar secara signifikan.

Daerah 3T menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat Pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah 3T, yang merupakan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, menghadapi sejumlah permasalahan utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan wilayah. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Aksesibilitas yang buruk: Daerah 3T sering kali sulit dijangkau karena jarak yang jauh dari ibu kota provinsi atau pusat pemerintahan, medan yang sulit atau berbahaya, dan kurangnya sarana transportasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan biaya logistik tinggi, kesulitan distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat yang rendah.
2. Kualitas pendidikan yang rendah: Daerah 3T masih menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan, seperti tingginya angka buta huruf, putus sekolah, dan tidak sekolah. Faktor-faktor seperti minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, dan kurikulum pendidikan yang belum relevan dengan kebutuhan daerah menyebabkan kualitas pendidikan rendah.
3. Kesehatan masyarakat yang buruk: Daerah 3T cenderung memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, tercermin dari angka kematian ibu dan anak, tingginya angka gizi buruk, serta tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, minimnya tenaga kesehatan berkualitas, serta kesadaran masyarakat yang terbatas menjadi faktor utama.
4. Kemiskinan dan ketimpangan sosial: Daerah 3T masih menghadapi tantangan ekonomi, dengan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia yang rendah. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta kurangnya akses modal, pasar, teknologi, dan informasi, menyebabkan banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami ketimpangan sosial.

Seperti di daerah 3T lainnya, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu disertai dengan strategi yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas pendidikan, pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kualifikasi dan kapasitas guru, serta penerapan metode pengajaran yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan di daerah 3T dapat terus meningkat, sehingga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, para birokrat di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) diharapkan menjadi akselerator pembangunan nasional di kawasan tersebut. Pembangunan di daerah terpencil menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat kondisi geografis dan topografi yang sulit dijangkau, yang mengakibatkan pelayanan publik yang kurang optimal dan minimnya kebijakan afirmatif di wilayah tersebut. Untuk mempercepat pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah 3T, peran negara melalui aparatur sipil negara (ASN) dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan.

Gambar 1.3 Kondisi Inovasi Empat Lokus Laboaratorium Inovasi Tahun 2020-2021

Kabupaten	Indeks Inovasi 2020	Indeks Inovasi 2021	KIPP	Inovasi Kelompok Marjinal
Nias Utara	Tidak dapat dinilai	Kurang Inovatif	Tidak ada	Tidak ada
Timor Tengah Selatan	Tidak dapat dinilai	Kurang Inovatif	Tidak ada	Tidak ada
Bulukumba	Kurang Inovatif	Inovatif	Tidak ada	ada
Merauke	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	2018	Tidak ada

Sumber: Kepmendagri No.002.6-415, Kepmendagri No.100-4672, 2019.

Pemilihan lokus program inovasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015, yang menetapkan daerah-daerah tertinggal tahun 2015-2019. Pemilihan wilayah 3T sebagai lokus Laboratorium Inovasi merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional untuk mencapai Visi 2045, yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Misi pembangunan nasional ke depan, sesuai dengan Visi Indonesia 2045, menargetkan Indonesia untuk mencapai peringkat ke-5 dalam perekonomian dunia dengan peningkatan signifikan peran luar Jawa mencapai 48,2% dan kontribusi Kawasan Timur Indonesia mencapai 25,1% terhadap perekonomian nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan memfokuskan laboratorium inovasi di wilayah-wilayah ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi dan model pembangunan

yang efektif dan berkelanjutan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, Kabupaten Nias Utara ditetapkan sebagai salah satu daerah tertinggal untuk periode 2020-2025. Secara geografis, Kabupaten Nias Utara memiliki potensi alam yang sangat kaya. Dengan perbatasan laut yang melimpah hasil perikanan, budaya unik, dan wilayah pegunungan yang indah, Kabupaten Nias Utara memiliki keindahan alam yang luar biasa. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, mengakibatkan berbagai permasalahan seperti rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingginya angka penderita stunting, tingginya angka kemiskinan, rendahnya pemenuhan layanan dasar, lambatnya pengembangan wilayah perbatasan dan terluar, kurangnya infrastruktur konektivitas yang baik, dan transportasi antar wilayah yang belum memadai. Kabupaten Nias Utara perlu membuktikan kepada daerah lain bahwa ia mampu keluar dari status daerah tertinggal dengan inovasi, serta memanfaatkan dan memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara diharapkan berperan sebagai katalisator dalam mempercepat pembangunan nasional dengan peran strategis dalam merumuskan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terpinggirkan. Dalam kerangka program inovasi, harapannya adalah munculnya solusi-solusi kreatif dan strategis yang dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh daerah 3T. Dengan melibatkan ASN sebagai agen perubahan di tingkat lokal, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Melalui sinergi antara inovasi dan peran strategis ASN, diharapkan dapat tercipta perubahan positif yang signifikan di daerah-daerah 3T menuju peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat (Supriadi *et al.*, 2020).

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Utara

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2020		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD <i>Up to Primary School</i>	4	-	4
SMP/Sederajat <i>General Vocational Junior High School</i>	10	-	10
SMA/Sederajat <i>General/Vocational Senior High School</i>	447	156	603
Diploma I, II/Akta I, II <i>Diploma I, II/Akta I, II</i>	79	43	122
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda <i>Diploma III/Akta III/Bachelor</i>	108	193	301
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D <i>University Graduates</i>	911	473	1 384
Jumlah/Total	1 559	865	2 424

Sumber: niasutarakab.bps.go.id, 2021.

Pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan kunci inovasi, karena kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sangat penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Tanpa pengembangan kompetensi, kinerja organisasi dapat terpengaruh negatif. Pemerintah mendorong ASN Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan

Izin Belajar yang diterbitkan pada 25 Maret 2013. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa tujuan peningkatan pendidikan bagi ASN adalah untuk mengembangkan diri, kemampuan, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Aparatur berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan. Transformasi pengembangan kompetensi melalui pendidikan ini penting karena adanya kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN.

Gambar 1.5 *Sustainable Development Goals*



Sumber: Website Bappenas, 2020.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, salah satu agenda prioritas nasional pemerintah adalah Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Presiden menekankan tiga arahan yang sangat relevan dengan pembangunan birokrasi Indonesia, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fokus pembangunan SDM ini mencakup semua sektor, baik swasta maupun publik, guna meningkatkan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan.

Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan 17 tujuan *SDGs* yang telah diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020. Melalui proses penyelarasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap 169 target dalam program *SDGs*, terdapat 118 target yang telah diselaraskan ke dalam RPJMN 2020-2024. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dari periode RPJMN sebelumnya, di mana hanya 94 target yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan nasional pada periode 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga memiliki signifikansi yang sangat penting. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, di mana target-target dari 17 tujuan *SDGs* beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 mencakup: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar membangun lingkungan hidup, (6) Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Pada agenda pembangunan ke 3, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Berkualitas, dapat diartikan bahwa SDM merupakan modal utama dalam upaya pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi kunci utama yang perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan daya saing yang tinggi sehingga Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut sesuai dengan visi pembangunan nasional. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan secara signifikan dalam tumbuh kembang manusia untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya. Pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik. Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Seperti dikemukakan Sikula (1981: 38) dalam (Ningrum, 2016): *“development in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personnel learn conceptual and theoretical knowledge for general purposes. Training is a short term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which nonmanagerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose.”*

Arah kebijakan dan strategi Indonesia dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pada program RPJMN 2020-2024 melalui: (1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. (2) Peningkatan pemerataan

akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. (4) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, (5) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Pada UU No. 20 Pasal 2 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, Tujuan ke-4 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang merata sepanjang hidup mereka. Fokus dari tujuan ini adalah untuk memperoleh keterampilan dasar dan tinggi di semua tingkat pendidikan, memperluas akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua tingkat, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan, serta memastikan individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berfungsi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial.

Memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang kepada setiap warganya tanpa terkecuali, karena negara adalah penyelenggara pendidikan. Prinsip kewajiban negara ini timbul sebagai konsekuensi logis dari ketentuan HAM internasional, yang menetapkan bahwa individu adalah pemegang hak (*right bearer*) dan negara bertanggung jawab sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*protect*), menghormati (*respect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak-hak warga negaranya.

Gambar 1.6 Lembaga Administrasi Negara Tandatangani *MoU* dengan 8 Instansi secara

Blended



Sumber: Divisi Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara, 2024.

Birokrasi saat ini sedang menghadapi kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah menyadari perlunya birokrasi yang adaptif dan lincah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh ketidakpastian. Setiap pemerintah daerah pada prinsipnya mampu untuk berinovasi. Ini didasarkan pengalaman Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam memfasilitasi pengembangan inovasi pemerintah daerah sejak tahun 2015. Program laboratorium inovasi adalah kegiatan fasilitasi penciptaan inovasi administrasi negara pada instansi pemerintah (SKPD) dengan menggunakan model *workshop* bertahap yang dikembangkan oleh LAN bernama 5D+1 (*Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display serta Documentation*), yang memberikan *evidence* bahwa setiap pemerintah daerah mampu berinovasi dengan *output* berupa ide inovasi yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah daerah lokus.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong setiap pimpinan instansi untuk menciptakan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai upaya akselerasi inovasi telah diupayakan oleh pemerintah sebagai wujud menghadirkan negara untuk melayani masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Terkait itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Program Prioritas Nasional Laboratorium Inovasi yang memprioritaskan daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah sebagai bentuk terjemahan Nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran. Delapan Instansi Pemerintah yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan adalah Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun beberapa *point* penting yang menjadi ruang lingkup kerja sama meliputi bidang inovasi administrasi negara, manajemen ASN, pengembangan kompetensi serta pendidikan tinggi terapan.

Gambar 1.7 Data Perkembangan Laboratorium Inovasi Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Ide Inovasi
1.	2015	4	281
2.	2016	13	1.541
3.	2017	20	1.767
4.	2018	30	3.190
5.	2019	17	9.191

Sumber: Divisi Pusat Inovasi Administrasi Negara LAN, 2020.

Laboratorium Inovasi menjadi tonggak penting dalam mendorong Reformasi Birokrasi di tingkat daerah, ini merupakan inisiatif sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan perlunya terobosan baru dalam bekerja guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Laboratorium Inovasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bukan hanya memberikan pendampingan kepada instansi mitra, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi secara *Co-Creation*, di mana inovasi dikembangkan melalui kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Sejak tahun 2015 hingga 2019, Laboratorium Inovasi telah melibatkan 84 daerah di seluruh Indonesia dan berhasil menghasilkan 9.191 ide inovasi. Pada tahun 2020, fokus program ini masih terus

berlanjut, dengan total 265 ide inovasi yang dihasilkan, terutama dengan lokus pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Upaya ini menunjukkan komitmen LAN untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Birokrasi berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*).

Pada tahun 2022, kabupaten Nias Utara menjadi salah satu lokus pelaksanaan laboratorium inovasi yang diselenggarakan oleh LAN RI melalui Pusat Inovasi Administrasi Negara (PIAN). Laboratorium inovasi hadir untuk mendorong semangat berinovasi di Kabupaten Nias Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah 3T, termasuk Kabupaten Nias Utara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara memimpin pelaksanaan laboratorium inovasi ini, berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Sebanyak 57 perangkat daerah mengikuti kegiatan laboratorium inovasi dalam program prioritas nasional tahun 2022, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara. Selama lima tahun terakhir, tingkat pencapaian pendidikan penduduk Indonesia menunjukkan perbaikan. Namun, ketimpangan dalam akses pendidikan masih ada. Menurut data BPS, masih terdapat penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP). Bahkan, ada penduduk yang tidak pernah bersekolah dan masih buta huruf.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengungkapkan bahwa banyak siswa kelas 2 hingga kelas 4, bahkan sebagian dari kelas 5 dan 6 SD, di wilayahnya masih belum bisa membaca. Selain itu, masalah putus sekolah dan kerusakan fasilitas pendidikan di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, masih sangat

memprihatinkan. Tingkat putus sekolah di daerah ini masih tinggi, dan banyak gedung sekolah yang rusak. Tingginya angka putus sekolah dan kerusakan ini perlu segera mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Nias. Selain itu, masalah stunting (gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi) yang mencapai 22,3% juga harus segera ditangani. Pembangunan di Kepulauan Nias pada tahun 2025 perlu difokuskan pada empat bidang: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar, dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan IPM bisa dilakukan melalui perbaikan di sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, dan kemandirian pangan. Hasil penelitian Sijabat (2013) dalam (Riyadi & Ghuzini, 2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan ketimpangan dalam pencapaian pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita. Dalam Nawacita tersebut untuk Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", dan membangun indonesia pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Pemberlakuan otonomi daerah telah mendorong perlunya

perubahan dan penyesuaian dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pencapaian tujuan ke-4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses pendidikan yang mandiri, berkualitas, serta sesuai dengan standar nasional dan global yang berlaku. Meskipun kerangka hukum dan komitmen anggaran di Indonesia dianggap memadai untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara, namun masih terdapat berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan, kualitas, kurikulum, kompetensi, dan fasilitas pendidikan di semua tingkat, dari tingkat dasar hingga tingkat atas, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu langkah konkret dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-4 tentang pendidikan berkualitas adalah melalui implementasi program Laboratorium Inovasi (Labinov). Program ini merupakan inisiatif dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang bertujuan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang, mengkaji, serta memberikan input data yang diperlukan dalam mengawasi, memonitor, dan memberikan bimbingan teknis saat menerapkan inovasi. Selain menyediakan dukungan teknis, Labinov berperan penting dalam melakukan inkubasi inovasi yang dibuat oleh dinas-dinas pemerintah daerah. Inovasi Labinov sekarang menjadi program pendamping yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perusahaan daerah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan gagasan yang dipertimbangkan oleh dinas-dinas tersebut dalam proses menghasilkan inovasi. Dengan demikian,

Labinov menjadi wadah bagi OPD dan Perusahaan Daerah untuk mengembangkan, menguji, dan mengoptimalkan ide-ide inovatif mereka, sekaligus menjembatani kebutuhan praktis dan teknis yang mungkin muncul dalam implementasi inovasi di tingkat daerah. Melalui perannya yang holistik, Labinov diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2020).

Landasan untuk berhasilnya inovasi, melalui program pendampingan dan asistensi, Laboratorium Inovasi berupaya meningkatkan kapasitas dan kesiapan Sumber Daya Manusia agar dapat mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi dengan baik. Kedua, kultur birokrasi dan kultur berinovasi yang berkembang di dalam organisasi memiliki peran krusial. Keberhasilan inovasi pelayanan publik memerlukan lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong ide-ide kreatif. Oleh karena itu, Laboratorium Inovasi tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga berfokus pada pembentukan kultur yang memfasilitasi dan mendukung proses inovasi di dalam organisasi. Ketiga, adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi menjadi faktor kunci. Tanpa dukungan tingkat kepemimpinan yang kuat, implementasi inovasi dapat mengalami kendala yang signifikan. Labinov berperan dalam memberikan fasilitasi dan bimbingan agar pimpinan instansi dapat memberikan dukungan yang efektif terhadap proses inovasi, baik dalam hal sumber daya maupun pengakuan terhadap nilai inovatif dalam pelayanan publik. Dengan memastikan adanya kesiapan SDM, membentuk kultur berinovasi, dan mendapatkan dukungan dari pimpinan, Labinov menjadi entitas yang mendukung dan mendorong perkembangan inovasi pelayanan

publik di tingkat daerah. Keberlanjutan Laboratorium inovasi ini juga didorong oleh penguatan *innovation-hub*. Tujuannya agar terbentuk koneksi jejaring komunikasi dan informasi antar-inovator di satu daerah dengan para inovator pada daerah lainnya. *Innovation-hub* juga sebagai sarana proses *experience sharing* dari satu daerah kepada daerah lain mengenai pentingnya menciptakan dan mengimplementasikan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang inovasi pelayanan publik Lembaga Administrasi Negara sebagai langkah strategis dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas sehingga peneliti memberikan judul **“Implementasi Program Laboratorium Inovasi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung *Sustainable Development Goals* Ke Empat Di Kabupaten Nias Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nias Utara?
2. Bagaimana Implementasi Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Nias Utara?
3. Bagaimana persepsi *Stakeholders* tentang Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara dalam Meningkatkan

Sumber Daya Manusia yang inovatif untuk mendukung *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Nias Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nias Utara.
2. Menganalisis Implementasi Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Nias Utara.
3. Menganalisis persepsi *Stakeholders* tentang Program Laboratorium Inovasi melalui Pusat Inovasi Lembaga Administrasi Negara dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang inovatif untuk mendukung *Sustainable Development Goals* ke-4 di Kabupaten Nias Utara.

1.4 Signifikasi

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang Inovasi Dalam Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* telah banyak dilakukan sebelumnya, namun peneliti belum menemukan penelitian tentang Implementasi Program Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung *Sustainable Development Goals* ke-4 yang terkait dalam penerapan prinsip reformasi birokrasi, karena penelitian ini berfokus pada Inovasi Pelayanan Publik Laboratorium Inovasi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung *Sustainable Development Goals* ke-4 maka membutuhkan beberapa referensi yang berkaitan dengan hal tersebut berupa jurnal dan skripsi.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Miftahul Rahma tahun 2020 dengan judul Kemitraan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Melalui Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (LABINOV BEKEN) di Kota Makassar. Salah satu inisiatif penting dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Makassar adalah Labinov Beken, yang bertujuan untuk membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan inovasi. Program ini berfokus pada memberikan dukungan kepada SKPD dan Perusahaan Daerah di seluruh Kota Makassar. Labinov Beken berusaha menghasilkan inovasi yang memiliki efek positif dengan mendalami ide dan gagasan yang dibahas. Program ini melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kapasitas

inovatif dengan memberikan pendampingan, supervisi, dan bimbingan teknis kepada OPD. Fokus kerja sama adalah untuk menyediakan dukungan teknis yang diperlukan untuk pengembangan inovasi lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari kolaborasi yang terbentuk antara Balitbangda dan LAN di Kota Makassar dan menemukan komponen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan inovasi Labinov Beken di daerah tersebut. Dengan pemahaman mendalam tentang dinamika kemitraan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program inovasi di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan pengembangan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subyek penelitiannya adalah kelompok yang terlibat dalam laboratorium inovasi berbasis kemitraan, yaitu: Kepala Balitbangda Kota Makassar, Kabid Pengembangan Inovasi dan Teknologi Balitbangda kota Makassar, Pengelola inovasi Labinov Beken, Fungsional Peneliti Muda LAN kota Makassar. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, pengumpulan dokumen dan materi audio dan visual. Serta dianalisis melalui teknik mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, membaca keseluruhan data dan memulai coding semua data.

Penelitian ini menemukan beberapa tanda kerja sama yang menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dalam hal inovasi Labinov Beken. Kolaborasi ini dianggap sangat penting karena keduanya memiliki visi dan prioritas yang sama, yaitu mendorong semua SKPD untuk menghasilkan

inovasi. Dengan inovasi Labinov Beken, kemitraan mutualistik didasarkan pada model pentahelix, di mana LAN dan Balitbangda saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan konjugasi ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lembaga Administrasi Negara mengalami manfaat dengan menghasilkan inovator-inovator yang sesuai dengan visi utamanya. Di sisi lain, Balitbangda LAN memberikan dukungan dalam bentuk narasumber dan penyusunan roadmap inovasi. Faktor-faktor yang mendukung kemitraan ini melibatkan fasilitas, jarak geografis, dan kepemimpinan yang efektif. Di sisi lain, hambatan seperti kendala waktu dan anggaran juga diidentifikasi. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi inovasi Labinov Beken di masa mendatang. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, para pemangku kepentingan terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan kemitraan dalam menghasilkan inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Relevansi jurnal dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan program inovasi yang diimplementasikan untuk mendorong semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menghasilkan inovasi. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, serta mengetahui faktor-faktor yang bersifat seragam dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program Laboratorium Inovasi Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek kesamaan dalam desain dan pelaksanaan program inovasi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola yang dapat digeneralisasi untuk berbagai SKPD. Melalui

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program Laboratorium Inovasi, penulis berusaha menyelidiki variabel-variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan inisiatif inovatif dalam konteks pelayanan publik. Dengan menjelajahi kesamaan program inovasi dan faktor-faktor pengaruhnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktis dan teoritis mengenai implementasi inovasi di tingkat SKPD, serta memperkaya literatur akademis dalam konteks administrasi publik dan reformasi birokrasi.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Dwian Hartomi Akta Padma Eldo dan Dyah Mutiarin tahun 2019 dengan judul *Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis Mbah Tejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)*. Salah satu inovasi pelayanan yang diterapkan di Kecamatan Tegalrejo adalah "Kumis Mbah Tejo", yang menambah tiga jam pelayanan setiap hari Kamis hingga Jumat. Pelayanan inovatif "Kumis Mbah Tejo" di Kecamatan Tegalrejo pertama kali dimulai pada November 2015 dengan nama "Jum'at Panjang" dan hanya beroperasi pada hari Jum'at sampai pukul 20.30 malam. Setelah beberapa waktu, kebijakan ini kemudian diubah menjadi beroperasi pada hari Kamis dan Jum'at hingga pukul 18.00 WIB. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah kecamatan untuk meningkatkan layanan publik. Inovasi ini menunjukkan komitmen pemerintah setempat untuk memberikan layanan warga yang lebih baik. Lebih lanjut, "Kumis Mbah Tejo" dijadikan sebagai laboratorium penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan inovasi

ini. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tetapi juga dijadikan sebagai subjek penelitian untuk memahami dampak dan potensi pengembangan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi memerlukan cara yang efektif untuk diperkenalkan kepada masyarakat, dan Kelurahan dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan penambahan jam pelayanan di Kecamatan Tegalrejo. Kelurahan dianggap sebagai instrumen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga efektif dalam menyampaikan informasi terkait inovasi pelayanan. Kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta biasanya menjadi bagian integral dalam pelaksanaan inovasi di sektor publik atau swasta. Tetapi dalam kasus "Kumis Mbah Tejo", pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kelurahan yang berada di bawahnya, bukan dengan perusahaan swasta. Inovasi "Kumis Mbah Tejo" menunjukkan bahwa upaya ini berasal dari pemerintah kecamatan dan melibatkan pemerintah kelurahan sebagai mitra. Untuk merencanakan dan menerapkan inovasi, memahami keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat sangat penting. Karena tujuan inovasi pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, setiap instansi diharapkan untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengadopsian inovasi dari instansi lain harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik masyarakat setempat, dan tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik perlu diakui dalam konteks keberagaman dan

keunikannya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan relevan sesuai dengan tuntutan dan karakteristik masyarakat setempat.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada inovasi pelayanan yang disebut "Kumis Mbah Tejo," yang telah diadopsi sebagai objek penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penelitian ini mencermati secara mendalam inisiatif inovatif tersebut, yang dianggap sebagai laboratorium penelitian, dan melibatkan proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan hingga saat ini. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada analisis konsep "Kumis Mbah Tejo" sebagai suatu bentuk inovasi dalam konteks pelayanan publik. Melalui pendekatan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus, penulis berupaya memahami dampak, keberlanjutan, dan efektivitas dari inisiatif tersebut. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis mencakup pemahaman mendalam terhadap pengembangan, implementasi, dan peran penting monitoring serta evaluasi dalam mengukur keberhasilan inovasi pelayanan. Dengan merinci perjalanan "Kumis Mbah Tejo" sebagai laboratorium penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktis dan akademis mengenai penerapan inovasi dalam pelayanan publik, serta memberikan wawasan yang dapat diadopsi oleh lembaga atau SKPD lainnya dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Azhalola Testiana, Rina Herlina Haryanti dan Kristina Setyowati tahun 2020 dengan judul BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian). Besuk Kiamat adalah salah satu inovasi unggulan yang diimplementasikan di Kota Surakarta. Tujuan dari inovasi

ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kematian. Setelah diterapkannya inovasi Besuk Kiamat, terjadi peningkatan kepemilikan akta kematian di kalangan masyarakat. Selain itu, inovasi ini juga berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya data kependudukan. Inovasi Besuk Kiamat dinilai sebagai langkah positif yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin menghargai masyarakat dengan menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan akta kematian. Dalam konteks kebencanaan, inovasi ini juga mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap penduduk yang terdampak musibah. Keberlanjutan dari program Besuk Kiamat tidak hanya memberikan administrasi berupa akta kematian, kartu tanda penduduk baru, dan kartu keluarga baru kepada keluarga yang berduka, tetapi juga diharapkan dapat memberikan santunan kepada keluarga yang mengalami kehilangan. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga memberikan dukungan kepada masyarakat dalam situasi sulit seperti kehilangan anggota keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi Besuk Kiamat lahir dari kesadaran akan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kematian sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Besuk Kiamat dapat dianggap sebagai inovasi proses dengan dampak yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kematian dan memberikan akurasi data bagi dinas terkait. Pentingnya Besuk

Kiamat dalam konteks pembangunan berkelanjutan terlihat melalui manajemen data kematian yang lebih baik dan terupdate. Inovasi ini mendukung prinsip-prinsip UU No 24 tahun 2013 tentang pelayanan publik berbasis jemput bola, di mana negara hadir untuk masyarakat melalui inovasi yang membantu memperoleh dokumen kependudukan. Proses implementasi Besuk Kiamat melibatkan beberapa tahap, termasuk penciptaan ide yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), uji coba *pilot project* di lima kelurahan, penentuan kelayakan melalui tahap *Drum Up, Diagnose, Design, Delivery, dan Display*, serta implementasi setelah keluarga duka melapor ke kelurahan dan proses lebih lanjut di Dispendukcapil. Selain itu, inovasi ini dapat direplikasi oleh berbagai pihak, termasuk di daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat pasca Gempa Lombok. Ini menunjukkan potensi Besuk Kiamat sebagai model inovasi yang dapat diterapkan di berbagai konteks untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesadaran masyarakat.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis terperinci terhadap inovasi yang dilakukan melalui tahapan Laboratorium Inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya, memahami tahapan-tahapan kritis yang terlibat dalam pelaksanaan program Laboratorium Inovasi. Dengan mengetahui inovasi melalui pendekatan Laboratorium Inovasi, penulis berupaya untuk mengurai dan menganalisis secara lebih mendalam setiap tahap dari inisiatif tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang proses pengembangan dan implementasi inovasi pelayanan publik, dengan fokus

pada bagaimana Laboratorium Inovasi berperan dalam menyusun, menguji, dan menerapkan ide-ide baru. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang struktur, proses, dan faktor-faktor kunci yang terlibat dalam tahapan Laboratorium Inovasi. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih terperinci dan kontekstual terhadap implementasi inovasi dalam konteks pelayanan publik, memperkaya literatur akademis dan praktis di bidang administrasi publik dan reformasi birokrasi.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro tahun 2020 dengan judul Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* telah menjadi agenda global yang disahkan pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada September 2015. Terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, agenda ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak di dunia, seperti mengakhiri kemiskinan, mencapai kemakmuran ekonomi, meningkatkan inklusi sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mewujudkan perdamaian serta tata kelola yang baik di seluruh dunia pada tahun 2030. Pencapaian Nawacita dan *SDGs* oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diakui tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang turut terlibat dalam kegiatan pembangunan. Peran partisipatif masyarakat menjadi kunci penting dalam proses pembangunan, memungkinkan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait arah, strategi, dan kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dukungan aktif masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan setiap inisiatif pembangunan.

Kesimpulan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi agenda global yang disahkan pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada September 2015. Terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, agenda ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak di dunia, seperti mengakhiri kemiskinan, mencapai kemakmuran ekonomi, meningkatkan inklusi sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mewujudkan perdamaian serta tata kelola yang baik di seluruh dunia pada tahun 2030. Pencapaian Nawacita dan SDGs oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diakui tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang turut terlibat dalam kegiatan pembangunan. Peran partisipatif masyarakat menjadi kunci penting dalam proses pembangunan, memungkinkan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dukungan aktif masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan setiap inisiatif pembangunan.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis mencerminkan fokus pada inovasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini secara khusus diarahkan untuk koordinasi dengan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan pada akhirnya mau terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Penelitian penulis menyoroti esensi inovasi sebagai

instrumen kunci untuk mendorong kemajuan yang berdampak positif pada masyarakat. Dengan menekankan koordinasi inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penulis berusaha memahami peran inovasi sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Inovasi tidak hanya dianggap sebagai suatu hal teknologi atau proses baru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis mencakup pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana inovasi dapat menjadi katalisator untuk kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan kerangka kerja bagi praktisi, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam memahami peran strategis inovasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Ely Sukmana tahun 2020 dengan judul Analisis Produk Inovasi Kebijakan Publik Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat. Paradigma kebijakan publik yang responsif dan memberikan ruang bagi perkembangan masyarakat secara mandiri telah membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Interaksi dan aktivitas yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berdampak positif. Paradigma ini mengakui dinamika, tuntutan, dan kepentingan publik sebagai faktor penting dalam proses kebijakan. Pentingnya inovasi kebijakan ditekankan oleh Menteri PAN-RB, Bupati, dan Sekretaris Daerah beserta jajaran, yang mengedepankan produk inovasi sebagai hasil nyata dari

kebijakan publik. Inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputy Inovasi Administrasi Negara juga menegaskan bahwa pemahaman dan penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni menjadi prasyarat utama bagi para inovator dalam menginisiasi, menjalankan, dan mengelola inovasi administrasi negara. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan dan kemauan berinovasi di kalangan pejabat publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan berinovasi dan memotivasi pejabat publik untuk berinovasi. Di samping itu, perlu juga penanganan terhadap tumpang tindih kebijakan dari instansi yang berbeda agar kebijakan publik dapat berjalan secara lebih optimal. Inovasi dianggap sebagai salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini mencerminkan semangat untuk terus mengembangkan kebijakan yang responsif, efektif, dan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya membangun partisipasi masyarakat, ditemukan beberapa jenis inovasi kebijakan publik. Jenis inovasi proses melibatkan perubahan standar operasional prosedur, tata laksana, serta sistem dan prosedur yang baru. Jenis inovasi metode mencakup penerapan strategi, cara, dan teknik baru, sementara jenis inovasi produk melibatkan pengembangan barang fisik maupun nonfisik atau penyediaan jasa baru. Dari segi empiris, manfaat inovasi dapat diamati melalui percepatan proses kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, integrasi layanan

menjadi lebih terpadu, perluasan pilihan publik terhadap barang-barang publik, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengurangan beban masyarakat atas layanan pemerintah, dan manfaat lain yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi publik dan stakeholders. Inovasi kebijakan publik memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat serta dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Produk inovasi dan kebijakan publik dianggap sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Inovasi memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kebijakan publik, sementara kebijakan publik memberikan pedoman dan metodologi yang memperkuat inovasi. Pentingnya inovasi dalam kebijakan publik ditekankan pada dimensi kebaruan dan kebermanfaatan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada upaya membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi bukan hanya terkait dengan evaluasi kebijakan, melainkan harus diterapkan sejak awal perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Inovasi kebijakan publik bukan hanya berasal dari faktor kepemimpinan atau krisis, melainkan harus muncul sebagai bagian dari sistem dan efek manajemen pengetahuan publik yang dikembangkan oleh organisasi.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya pada upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang menekankan dimensi kebaruan dan kebermanfaatan. Jurnal ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif dalam usaha membangun partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Poin penting dalam jurnal ini adalah penekanan pada penerapan inovasi, yang tidak hanya terbatas pada

tahap evaluasi kebijakan publik, tetapi dimulai sejak awal perencanaan, melibatkan implementasi, dan berlanjut hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana inovasi dapat berperan sebagai instrumen utama dalam membangun keterlibatan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan menitikberatkan pada dimensi kebaruan dan kebermanfaatan dalam inovasi kebijakan publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi yang berkecimpung dalam upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada penawaran wawasan praktis dan solusi konkret untuk mendukung pembangunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Martinus Ivan Suryo Wibowo dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari tahun 2020 dengan judul *Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa*. Dampak besar dari pandemi COVID-19 pada berbagai sektor, terutama perekonomian nasional, memicu respons pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian. Upaya pemulihan ini, khususnya di tingkat desa, ditekankan melalui revitalisasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk mempercepat implementasi program PEN, dan keberhasilan revitalisasi BUMDes

diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 menjadi pedoman dengan menekankan orientasi keuntungan dalam aktivitas operasional BUMDes, bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMDes dianggap sebagai wadah untuk pengelolaan sumberdaya alam dan manusia oleh masyarakat desa, mendorong inisiatif lokal, dan memberikan kontribusi pada pengembangan desa. Sejalan dengan upaya pemerintah desa dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa, BUMDes memegang peran sentral dalam mencapai indikator pembangunan desa yang merata, tanpa kesenjangan, damai, berkeadilan, dan dinamis dengan budaya adaptif. Penguatan pengelolaan keuangan BUMDes dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan optimalisasi peran BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, menjadi langkah kunci dalam mendukung pemulihan dan pembangunan nasional.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan disiplin anggaran pada pengelolaan keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur sudah diimplementasikan secara umum di semua tahapannya. Meskipun demikian, transparansi keuangan bulanan kepada masyarakat masih belum mencapai tingkat optimal. Kendala utama terletak pada keterbatasan dalam menyediakan akses informasi keuangan bulanan kepada seluruh masyarakat. Pada saat ini, transparansi keuangan masih terbatas karena laporan keuangan hanya dipasang di papan

informasi kantor BUMDes Bersama dan hanya dapat diakses oleh Ketua Kelompok Perguliran. Keterbatasan ini disebabkan oleh sistem pembayaran angsuran pinjaman yang hanya dapat dilakukan oleh Ketua Kelompok Perguliran. Oleh karena itu, hanya ketua kelompok yang dapat melihat laporan keuangan tersebut sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki kepentingan. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, BUMDes Bersama perlu mempertimbangkan adopsi sarana penyebaran informasi berbasis online. Sarana online, seperti grup media sosial, dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi keuangan kepada masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Menerapkan solusi ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur dan mendukung prinsip transparansi yang lebih efektif.

Relevansi jurnal dengan penulis terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam konteks pencapaian target program atau kegiatan. Monitoring dan evaluasi diakui sebagai elemen kunci dalam manajemen program yang efektif. Penulis menggaris bawahi bahwa praktik monitoring yang baik dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang jalannya kegiatan, memungkinkan identifikasi hambatan, serta memberikan masukan yang berharga untuk evaluasi. Pentingnya monitoring dan evaluasi juga diungkapkan dalam konteks pemecahan masalah. Dengan memahami dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program, tim manajemen dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Jurnal tersebut mengamati bahwa monitoring yang efektif membantu memastikan bahwa kegiatan berada sesuai dengan pedoman dan rencana program, sementara evaluasi

memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan efektivitas program tersebut. Sebagai kesimpulan, jurnal tersebut memberikan dukungan terhadap ide bahwa monitoring dan evaluasi bukan hanya aktivitas rutin, melainkan alat yang strategis untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif dari program atau kegiatan. Ini sejalan dengan pemahaman penulis akan pentingnya dua aspek ini dalam konteks pelaksanaan program.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Fajar Puja Pangestu dkk tahun 2021 dengan judul *Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030*. *Sustainable Development Goals* merupakan suatu sistem yang telah direncanakan dan juga memiliki komitmen oleh para pemimpin bangsa, dimana termasuk pemimpin Indonesia. Penyelenggaraan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dilaksanakan secara global dan bersifat makro, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki potensi untuk mengubah Indonesia menjadi negara berkembang yang mampu tumbuh di semua sektor dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan secara efektif. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, disahkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Perwakilan Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut berpartisipasi dalam penyusunan dan pengesahan tujuan tersebut. Dalam konteks ini, lima prinsip Pancasila diakui memiliki nilai-nilai yang saling tumpang tindih dengan *SDGs*. *Sustainable Development Goals* fokus pada tiga

tema utama: ekonomi, masyarakat, dan biosfer. Terdapat kesamaan tujuan antara Pancasila dan *SDGs*, yaitu mempertahankan kehidupan sosial, melayani kemanusiaan, memelihara budaya, dan berjuang untuk keadilan. Sementara Pancasila dan *SDGs* mengembangkan konsep kewarganegaraan global, jurnal ini lebih memfokuskan pada hubungan Ekonomi Pancasila dengan *SDGs*, terutama dalam ranah ekonomi yang relevan dengan tujuan *SDGs*, seperti poin 7, 8, 9, 10, dan 17.

Kesimpulan dari artikel ini menekankan perlunya optimalisasi peran pemerintah melalui peningkatan efektivitas kebijakan yang telah ada atau menciptakan inovasi kebijakan baru yang sesuai dengan visi dan misi ekonomi Pancasila serta sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Khususnya dalam konteks ekonomi, langkah-langkah tersebut dianggap dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat juga menjadi sorotan, di mana mereka diharapkan untuk keluar dari zona nyaman dan mendukung kebijakan pemerintah, menciptakan sistem yang selaras dan tepat sasaran. Selain itu, artikel merekomendasikan pengembangan *SDGs* Desa sebagai upaya untuk mengintegrasikan tujuan global *SDGs* ke dalam konteks pembangunan desa dan perdesaan. Dengan adanya *SDGs* Desa, pemantauan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat lebih efektif, sekaligus sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Implementasi program *SDGs* Desa diharapkan dapat memastikan distribusi keadilan dan kesejahteraan yang merata dan menyeluruh di seluruh wilayah. Pengelolaan program *SDGs* Desa dapat melibatkan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dan mitra terkait, dengan pengawasan yang ketat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan demikian, keseluruhan upaya ini diarahkan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada inovasi pelayanan publik di wilayah yang tertinggal untuk mendukung pencapaian tujuan global *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Meskipun fokus penelitian penulis berbeda, yaitu pada inovasi pelayanan publik, terdapat keterkaitan yang erat dengan pembahasan *SDGs*, terutama pada aspek pembangunan daerah tertinggal. Penelitian ini berupaya menjembatani hubungan antara upaya inovasi dalam pelayanan publik dengan program prioritas nasional, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang tertinggal. Dengan mengetahui inovasi pelayanan publik di daerah-daerah tertinggal, penelitian ini mencoba mengidentifikasi kontribusi positif inovasi terhadap pembangunan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Upaya untuk mengaitkan inovasi pelayanan publik dengan *SDGs* menciptakan kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana inovasi dapat menjadi alat strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah yang mengalami ketertinggalan. Dengan demikian, relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs*, terutama dalam konteks pembangunan dan perbaikan kondisi di daerah-daerah tertinggal.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Maria Ulfa dkk tahun 2023 dengan judul Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan Data *SDGs* sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Berlandaskan Permendes No. 13 Tahun 2020 dengan acuan pada Perpres No. 59 Tahun 2017, diterapkanlah *Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa)* karena dianggap memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai *SDGs* di Indonesia. *SDGs Desa* merupakan suatu inisiatif terpadu dengan tujuan mewujudkan desa yang terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Program ini menggarisbawahi pencapaian desa yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang merata, memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Lebih lanjut, *SDGs Desa* juga menekankan pentingnya pembangunan desa yang memperhatikan peran perempuan, bersifat inklusif terhadap keragaman budaya, dan memiliki jaringan sosial yang kuat. Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, *SDGs Desa* membentuk kerangka kerja holistik untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui *SDGs Desa*, diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks kehidupan di desa. Inisiatif ini menjadi landasan bagi upaya bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian *SDGs* di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tingkat desa.

Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa pembangunan memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Agar pembangunan dapat

berjalan dengan lebih baik, para pemimpin dunia berkomitmen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mencakup agenda pembangunan global. Tujuan dari kebijakan global ini adalah untuk mengatasi permasalahan kompleks dan tantangan yang muncul dalam proses pembangunan di berbagai negara. Pada tahun 2015, pemimpin-pemimpin negara sepakat untuk mengadopsi *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) sebagai komitmen terhadap pembangunan global. *SDGs* Desa kemudian dihasilkan sebagai adaptasi yang lebih sederhana dari *SDGs*, dengan tujuan untuk menyelesaikan tantangan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, *SDGs* Desa menjadi panduan untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh dunia dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara.

Relevansi jurnal dengan penulis adalah jurnal ini mencerminkan pentingnya pemahaman terhadap profil sebuah desa dan tingginya partisipasi masyarakat sebagai tolak ukur keberlangsungan suatu program. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung suksesnya program-program pemerintahan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami secara mendalam profil desa, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kritis, karena melibatkan mereka secara aktif dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi program. Partisipasi masyarakat menciptakan keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal, sehingga solusi yang diimplementasikan lebih relevan dan diterima oleh komunitas setempat. Dengan demikian, relevansi jurnal

dengan penulis adalah menekankan pentingnya mengukur keberlangsungan program dengan mempertimbangkan karakteristik dan partisipasi masyarakat dalam konteks desa.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh Iis Asiska dan Fitri Nurmahmudah tahun 2022 dengan judul Pengelolaan Tenaga Pendidikan di Daerah 3T SMP Negeri 1 Maratua. Pendidikan memainkan peran penting sebagai penentu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam membentuk generasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kurang meratanya distribusi guru, upaya tersebut masih belum optimal, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Teringgal). Hal ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Indonesia, yang semakin tertinggal di tengah kemajuan Globalisasi yang pesat. Kurangnya dukungan dalam hal sarana, prasarana, tenaga kependidikan, dan infrastruktur gedung sekolah yang memadai menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan juga menjadi penentu arah pembangunan bangsa, dan oleh karena itu, pengelolaan tenaga pendidik di daerah 3T menjadi kunci penting untuk menjadikan sekolah bermutu dan berkualitas. Hal ini diharapkan dapat membuat pendidikan di daerah 3T setara dengan daerah perkotaan, sehingga sekolah dapat bersaing dengan mutu pendidikan di kota.

Hasil penelitian ini menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam konteks pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan, sebagaimana yang terlihat dari penelitian ini, memiliki potensi untuk diterapkan

secara efektif di sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). Pendekatan penerapan TIK di daerah 3T ini didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu memberdayakan, *bottom-up*, keberlanjutan, pendekatan pembelajaran modern, dan kemitraan. Temuan studi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK di daerah 3T, berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran oleh guru, memberikan motivasi kepada siswa untuk bersekolah secara teratur, dan merangsang partisipasi masyarakat dalam memastikan tingkat partisipasi yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka. Sebagai solusi terhadap tantangan umum dalam pendidikan fisika di daerah-daerah tertentu (3T), terutama yang terkait dengan kurangnya fasilitas dan infrastruktur laboratorium, penelitian ini mencoba mengusulkan pemanfaatan Laboratorium Fisika *Virtual* atau laboratorium *online* melalui portal Rumah Belajar. Penting untuk dicatat bahwa, mengingat kurangnya konektivitas internet di sekolah-sekolah daerah 3T, versi offline dari platform Rumah Belajar menjadi alternatif utama. Siswa yang menggunakan laboratorium *virtual* dihadapkan pada tantangan melalui inisiatif "satu bulan satu eksperimen" (OMMEN), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika melalui tugas-tugas yang mereka selesaikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam mengenai solusi pendidikan yang berbasis TIK, terutama di lingkungan pendidikan yang memiliki tantangan infrastruktur dan konektivitas.

Relevansi jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pengelolaan pendidikan di daerah 3T, yang dapat menjadi efektif dan berkualitas tinggi jika kebutuhan para pendidik terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup

penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan guru secara individu dan masalah-masalah yang lebih luas di dalam lingkungan sekolah dan praktik pengajaran. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara efektif, maka pengelolaan pendidik di daerah 3T dapat berkualitas tinggi, dan masalah distribusi guru di daerah-daerah tersebut dapat dikurangi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ada kebutuhan yang jelas akan layanan publik yang inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, terutama di daerah 3T.

Rujukan kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Alvira Oktavia Safitri dkk tahun 2022 dengan judul Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan untuk kemajuan suatu bangsa, pendidikan tidak sekedar sebagai sarana '*agent of change*' bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi '*agent of producer*' agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Esensi pendidikan melampaui aspek formal, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk mengubah pola pikir dan cara pandang generasi muda, yang akan menjadi pemimpin masa depan. Pendidikan yang inovatif dan berkualitas tinggi sangat penting dalam menumbuhkan kreativitas individu, terutama generasi muda, membentuk mereka menjadi pribadi yang selalu ingin tahu dan agen inovasi yang sangat penting untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan UNESCO, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di dunia dalam hal kualitas pendidikan. Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia menempatkan Indonesia di peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015.

Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, yang berada di posisi ke-11. Untuk mengatasi masalah ini, program *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diimplementasikan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. *Sustainable Development Goals*, yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), melibatkan berbagai negara yang lebih luas, mencakup negara maju, berkembang, dan kurang berkembang. Salah satu strategi utama dalam implementasi SDGs, khususnya di sektor pendidikan, terangkum dalam Tujuan 4: "Menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua." Melalui program ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan mengalami peningkatan, selaras dengan tujuan menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa situasi pendidikan di Indonesia masih mengkhawatirkan dan belum merata di seluruh wilayah. Upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia fokus pada Tujuan Keempat, yaitu Pendidikan Berkualitas yang adil dan merata serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hidup bagi semua kalangan. Namun, penerapan strategi ini baru terlihat di beberapa provinsi, menunjukkan bahwa masih ada daerah lain yang belum mengimplementasikan strategi SDGs untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Penerapan strategi ini di lapangan juga menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan akses ke sekolah, perbedaan budaya, serta rendahnya kompetensi dan kualitas tenaga

pengajar di daerah terpencil. Hal ini menjadi suatu perhatian serius karena kondisi ini tidak memberikan optimisme terhadap perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk melalui program seperti Program Satu Atap (SATAP), Program Pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan Program Baca, Tulis, Hitung (*Calistung*). Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi strategi ini masih sangat nyata, dan langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Diperlukan upaya lebih lanjut dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala yang masih dihadapi dalam mencapai visi pendidikan berkualitas di seluruh negeri.

Relevansi jurnal dengan penulis terlihat jelas dalam usahanya untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Penulis mendorong beberapa provinsi lain untuk aktif terlibat dalam mensukseskan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), khususnya dalam sektor pendidikan. Hal ini dianggap penting agar Indonesia dapat mencapai strategi *SDGs* dan menciptakan kemajuan, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Peneliti menekankan bahwa suksesnya program *SDGs*, terutama di bidang pendidikan, akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Negara Indonesia. Mereka meyakini bahwa masyarakat yang berpendidikan memiliki potensi untuk mengubah dan membangun negara menjadi lebih baik di masa depan. Pendekatan ini melibatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peneliti juga menyoroti pentingnya peran Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas tinggi dalam membentuk negara yang berkualitas. Oleh karena itu, mereka mendorong terus dilakukannya pembaharuan dalam pelayanan publik sebagai upaya mendukung keberlangsungan *SDGs* sebagai program prioritas nasional. Dengan demikian, penulis menggarisbawahi perlunya kolaborasi aktif antara berbagai provinsi dan pihak terkait untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak membahas peningkatan pelayanan publik di daerah tersebut, seperti yang disajikan oleh Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro (2020), Ely Sukmana (2020), Martinus Ivan Suryo Wibowo dan rekan-rekannya (2022), Fajar Puja Pangestu dan rekan-rekannya (2021), Maria Ulfa dan rekan-rekannya (2023), Iis Asiska dan rekan-rekannya (2022), serta Alvira Okravia Safitri dan rekan-rekannya (2022). Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut lebih tertuju pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Selain itu, sejumlah penelitian terdahulu juga membahas inovasi pelayanan publik dengan fokus pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, seperti yang telah diungkap oleh Dwian Hartomi Akta Padma Eldo dan Dyah Mutiarin (2019), serta Azhola Testiana dan rekan-rekannya (2018). Penelitian-penelitian ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana inovasi pelayanan publik dapat berkontribusi terhadap pencapaian *SDGs*. Selain itu, penelitian terdahulu juga telah mengulas tentang kemitraan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Laboratorium Inovasi, yang kemudian dihubungkan dengan penerapan prinsip reformasi birokrasi, seperti yang dibahas oleh Miftahul Rahma

(2020). Ini menunjukkan keragaman fokus penelitian sebelumnya, yang mencakup aspek peningkatan pelayanan publik, pencapaian *SDGs* melalui inovasi, dan kemitraan dalam konteks reformasi birokrasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana peningkatan pelayanan publik dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik daripada membahas tentang monitoring dan evaluasi sebuah inovasi sehingga inovasi tersebut dapat mendorong keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pilar utama pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik menyoroti urgensi peningkatan kualitas layanan dengan pendorongan pada kepentingan masyarakat, serta ketegasan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Perubahan paradigma pengawasan dalam konteks reformasi birokrasi mencerminkan pergeseran peran kritis auditor internal di organisasi, yang kini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan data dan informasi, tetapi lebih mengedepankan evaluasi kebijakan serta menjaga mutu pelayanan publik. Pentingnya auditor internal tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai evaluator kebijakan menjadi sorotan utama, di mana mereka diharapkan berperan aktif dalam menilai dampak kebijakan terhadap pelayanan publik. Pemahaman yang mendalam terkait inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci, dan langkah strategis awal ditekankan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan inovasi yang telah diterapkan, serta memberikan dasar

untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka memajukan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dari perspektif akademik, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam ranah Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam konteks inovasi dan pelayanan publik sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini diantisipasi dapat memberikan wawasan baru dan data tambahan yang relevan terkait implementasi reformasi birokrasi melalui inovasi dalam pelayanan publik, dengan tujuan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 4. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah, meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika reformasi birokrasi, dan memberikan perspektif berharga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memperdalam pemahaman terkait inovasi pelayanan publik dalam mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia di kabupaten nias utara untuk pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama pada Tujuan ke-4 yang menjadi fokus dalam konteks Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara. Penelitian ini diantisipasi memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana inovasi pelayanan publik

dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di lembaga pemerintahan. Dengan menitikberatkan pada Tujuan ke-4 *SDGs*, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peran strategis inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di kabupaten nias utara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan empiris yang kuat dan wawasan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, praktisi, dan pengambil kebijakan di kabupaten ini dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat bagi Instansi Pemerintah

Manfaat yang diharapkan untuk instansi pemerintah dari hasil penelitian ini mencakup pemberian kontribusi informasi berharga. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber wawasan yang signifikan, khususnya dalam menggali inovasi dari instansi terkait. Dengan demikian, diharapkan bahwa inovasi yang ditemukan dapat lebih tepat sasaran dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi di lapangan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi, mendorong, dan mendorong orang-orang untuk lebih peduli terhadap lingkungannya dengan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui keterlibatan masyarakat dalam program inovasi

pelayanan publik, diharapkan program tersebut dapat lebih tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-4 yang menekankan pendidikan berkualitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan ini mencakup penjelasan dan pembahasan penulis untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai landasan penelitian. Latar belakang masalah mengidentifikasi konteks penelitian, diikuti oleh rumusan masalah yang merinci fokus penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan untuk memberikan gambaran tujuan akhir dari penelitian ini. Signifikansi penelitian dibagi menjadi dua aspek: signifikansi akademis yang menyoroti kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan, dan signifikansi praktis yang menunjukkan dampak penelitian pada praktik dan kebijakan. Terakhir, sistematika penulisan memberikan panduan terkait struktur penulisan secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini membahas berbagai teori yang menjadi dasar penelitian, terutama yang terkait dengan inovasi pelayanan publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Teori implementasi, teori inovasi, teori pelayanan publik, teori *Sustainable Development Goals*, dan teori persepsi *stakeholders* diuraikan.

Kerangka pemikiran dan asumsi penelitian juga disajikan untuk memberikan landasan konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan paradigma penelitian, metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, serta *Goodnessy* dan *Quality Criteria*. Lokasi dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan batasan penelitian juga diuraikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dengan memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Hasil penelitian dibahas berdasarkan rumusan masalah, teori yang menjadi acuan, dan temuan di lapangan. Pembahasan ini memberikan analisis mendalam terhadap data dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memberikan kesimpulan yang diambil dari seluruh temuan penelitian. Rekomendasi penelitian juga disajikan, mencakup saran-saran untuk objek penelitian dan arah penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, termasuk buku-buku, jurnal, produk hukum, dan situs web.

LAMPIRAN

Lampiran berisi elemen-elemen penting yang terkait dengan penelitian, seperti pedoman wawancara, instrumen penelitian, informasi pendukung penelitian, dan dokumentasi. Lampiran menjadi pelengkap yang mendukung keabsahan dan kelengkapan penelitian.